

BAB III
MENURUNNYA SUARA POLITIK SANTRI DALAM PEMILU
LEGISLATIF 2014 DIPONDOK PESANTREN
AL-MUNAWWIR

Politik dan agama sering dipahami secara terpisah di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga seolah tidak ada keterkaitan fungsional dan organik antara politik dan agama serta politik dan dakwah. Bahkan ada kesan dalam masyarakat seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan, dan pelbagai konotasi buruk lainnya. Bagi M Amien Rais persepsi politik yang demikian tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kaca mata agama dan dakwah, pandangan politik seperti ini juga sangat merugikan.

Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian penting peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah panglima. Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Dengan demikian, maka politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. karena berpolitik semestinya berorientasi kepada kemaslahatan dan berguna bagi orang banyak.⁶¹ Dalam hubungan ini, Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekularisasi. Mengutip Harvey Cox, Amien Rais menggambarkan yang dimaksud dengan sekularisasi dan komponen-komponennya adalah, disenchantment of nature, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. Disenchantment of nature berarti pembebasan alam dari nilai-nilai agama, agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai agama, supaya manusia bebas mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama yang bersifat absolut.

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power). Sebagaimana dikatakan V.O. Key, Jr., politik terutama terdiri atas hubungan antara superordinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submisi, antara yang memerintah dan yang diperintah. George Catlin memberi takrif politik sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (the act of human social control). Sedangkan Harold Lasswell

⁶¹ Rijal Mumazziq Zionis, *Cermin Bening Dari Pesantren* (Surabaya : Khatulistiwa, 2009) Hal : 107.

memberikan pengertian politik menyangkut who gets what, when and who. What di sini terutama berupa kekuasaan atau otoritas politik. Sedangkan siapa, kapan, dan bagaimana, adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat.

Menurut Amien Rais, politik kepartaian, proses rekrutmen pejabat atau pegawai, proses agregasi dan artikulasi kepentingan, proses pemecahan konflik kepentingan antar golongan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan politik domestik maupun luar negeri dan lain sebagainya, adalah contoh-contoh kegiatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi moral dan etik yang dianut." Bagi Amien Rais, seorang Marxis, tindakan politik adalah baik bila tindakan itu menguntungkan kaum proletar, memperlemah posisi golongan yang mereka katakan borjuis, dan menuju revolusi sosial ke arah masyarakat tanpa kelas. Begitu halnya dengan seorang sekularis-pragmatis, suatu tindakan politik itu baik jika dapat memberi keuntungan praktis dan manfaat material, walaupun hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Sedangkan bagi seorang muslim, suatu tindakan politik itu baik kalau ia berguna bagi seluruh rakyat, sesuai dengan ajaran rahmatan lil'alamin.

Dengan melihat berbagai kenyataan politik di atas, menurut Amien Rais, dalam kaca mata Islam ada dua jenis politik. Yaitu politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis (high politics) dan politik kualitas rendah atau politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista (low politics). Dalam konteks organisasi, Amien mencontohkan: "Bila sebuah organisasi menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak

masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, mengimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokrasi dan keterbukaan, maka organisasi tersebut pada hakikatnya sedang memainkan high politics. Sebaliknya, bila sebuah organisasi melakukan gerakan manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, minta bagian di lembaga eksekutif, membuat kelompok penekan, membangun di lobi, serta berkasak-kusuk untuk mempertahankan atau memperluas vested interest, maka organisasi tersebut sedang melakukan low politics.⁶²

Mobilitas politik santri mulai memasuki golongan politik secara historis dan ideologis. Kriteria santri tidak hanya terbatas pada hubungan dengan salah satu golongan politik, akan tetapi secara luas berhubungan dengan semua golongan politik. Politik santri melalui partai islam ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pemeluk Islam sesuai dengan jumlahnya yang mayoritas. Hal ini menarik jika dihubungkan dengan konsep dan cita-cita perjuangan islam golongan santri yang ternyata tidak memperoleh dukungan mayoritas pemeluk islam sendiri, sebagian diantara elit santri justru memberikan dukungan kepada partai non Islam atau tidak mendukung sama sekali.

Kaum santri memiliki catatan sejarah cukup panjang dan dinamis dalam dinamika politik nasional paska kemerdekaan, atau selama kolonial. Dinamika kaum santri dalam peta sosial politik nasional hampir identik dengan dinamika Indonesia sebagai bangsa. Perubahan perilaku santri bisa menjadi petunjuk untuk melihat arah perubahan kebangsaan Indonesia yang selanjutnya

⁶² substantiajurnal.org/index.php/subs/article/download/5/4

memberi petunjuk perubahan dunia pesantren. Karena itu seiring berbagai perubahan kebangsaan, perilaku santri tampak berubah secara berarti, seperti yang dialami pesantren. Di Krapyak, yang penduduknya mayoritas beragama Islam mempunyai kurang lebih 4 pondok pesantren yang masing-masing pondok pesantren diasuh oleh seorang kiai.

Dusun Krapyak sendiri memiliki banyak pesantren dan santri yang menetap didalamnya untuk mempelajari dan memperoleh ilmu-ilmu agama, merupakan suatu hal yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi partai politik untuk bisa memperoleh dukungan dari para kiai dan santri yang ada di Krapyak. Karena jika para kiai dan santri yang menetap didalam pesantren memberikan dukungan yang penuh kepada salah satu partai politik, tidak menutup kemungkinan partai tersebut akan memperoleh suara yang banyak pada pemilihan umum. Berbicara masalah partai yang didukung oleh seluruh kiai pesantren yang ada di Krapyak, sudah bisa di duga bahwa yang didukung oleh para kiai yang ada di Krapyak adalah partai yang berhaluan ahlussunah wal jama'ah yang merupakan haluan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Karena di Krapyak, pondok yang terbesar menganut sistem klasik atau tradisional, bukan sistem modern yang para pengajarnya biasanya terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Di pondok pesantren klasik, segala aturan berada di tangan pengasuh pondok pesantren (kiai). Demikian juga dalam hal organisasi harus sesuai dengan apa yang diyakini oleh kiai.

Dalam tipologi ideologis, umat Islam memposisikan berpolitik sama dengan beragama Islam. Sehingga semangat pembelaan politik sama dengan

semangat membela dan memiliki Islam. Memiliki sebuah partai politik sama dengan memilih agama Islam, dan seterusnya ketaatan dalam politik sama dengan ketaatan menjalankan ajaran Islam.

Sedangkan tipologi Kharismatis mengasumsikan bahwa umat Islam memilih sebuah partai politik mengikuti sikap dan perilaku seseorang yang dikagumi di sekitarnya. Apa yang dikatakan dan dilakukan figur selalu menjadi rujukan masyarakat. Akibat kekaguman yang berlebihan umat Islam sering tidak mampu bersikap dan berpikir rasional. Dalam tipologi rasional, kemampuan umat Islam dalam memilih partai politik (sikap politik) benar-benar didasarkan pada pandangan rasional. Memilih atau tidak memilih partai politik tertentu dilihat dari kemampuan partai politik menawarkan program yang dapat memperbaiki atau memperjuangkan nasib rakyat.

Saat ini mayoritas umat Islam masih menempati posisi tipologi pertama dan kedua, ketimbang pada posisi tipologi yang ketiga. Maka ketika umat Islam memandang bahwa berpolitik sama dengan beragama Islam, maka karakter ini akan mendorong munculnya tokoh-tokoh agama sebagai tokoh politik. Persoalan-persoalan umat yang bersinggungan dengan kepentingan politik tidak lagi ditangani oleh politisi profesional, tetapi diambil alih oleh kiai dan tokoh-tokoh pesantren yang merasa memiliki pengaruh dan otoritas keagamaan lebih besar atas umat yang dipimpinnya.

Beberapa pesantren di Indonesia memiliki ciri khas sendiri dalam hal struktur organisasinya. Di pesantren Krapyak dalam gaya kepemimpinan pesantren tersebut juga memiliki perbedaan. Di pesantren Al-Munawwir

Krapyak, kedudukan dan kekuasaan pimpinan sangat kuat dan mantap. Hal ini disebabkan karena adanya tata nilai dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti yang muda menghormati yang tua, murid menghormati guru, dan murid tidak akan menjadi baik tanpa guru. Sedangkan di pesantren Ali Maksum Krapyak kepemimpinan dilakukan secara pribadi oleh KH Attabiq Ali sebagai pimpinan tunggal pesantren. Di pesantren Ali Maksum kedudukan dewan kyai hanya sebagai penjaga kemurnian nilai agama dan menjadi dari salah satu unit kerja dari kesatuan administrasi penyelenggaraan pesantren, jadi dalam pesantren Ali Maksum rasa tunduk santri kepada kiai cenderung berkurang dalam artian santri bebas berdiskusi dengan kiai tanpa rasa sungkan seperti masa-masa awal berdirinya pesantren, dimana seorang santri bahkan tidak berani menatap mata sang kiai saat berbicara. Sekarang ini gaya kepemimpinan beberapa di pesantren juga mengalami pergeseran dari *karismatik* (keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya) menuju ke *rasional* (kepemimpinan harus diimbangi dengan nilai-nilai rasionalitas yang secara timbal balik diakui dan dibenarkan, baik oleh sang pemimpin maupun pengikutnya), *otoriter* (pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara otoriter)⁶³ - *paternalistik* (sistem kepemimpinan yang menunjukkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan dilaksanakan seperti hubungan antara bapak dan anak) menuju ke *diplomatif partisipatif* (kepemimpinan yang mencoba mendekati anggotanya secara persuasif dengan

⁶³ DR. W.A. Gerungan Dipl. Psych, *Psikologi Sosial* (Bandung : PT Eresco, 1998) Hal : 132.

jalan menjual ide-ide dan mengadakan pendekatan terhadap para anggotanya untuk bersikap terbuka mengeluarkan ide-ide mereka)⁶⁴ dan *laisser-faire* (pemimpin yang menjalankan peranan yang pasif. Ia menyerahkan segala penentuan tujuan dan kegiatan kelompok kepada anggota-anggotanya sendiri)⁶⁵ menuju ke *birokratik* (kepemimpinan yang dijalankan dengan menginformasikan kepada para anggota atau bawahan apa dan bagaimana sesuatu itu harus dilaksanakan).

Secara historis, Pesantren Al-Munawwir Krapyak adalah sebuah pesantren NU yang besar dan berpengaruh di Yogyakarta. Sejak dipimpin oleh pendirinya KH. Munawwir hingga menantunya KH. Ali Maksum, pesantren ini benar-benar berkembang pesat dan memiliki pengaruh yang kuat. Dua tokoh tersebut memiliki spektrum pengaruh yang besar dan meluas hingga ke tingkat nasional. Tidak mengherankan bila apapun yang difatwakan menjadi pegangan santri dan masyarakat, termasuk dalam urusan politik.

Namun setelah ditingal KH Ali Maksum, Pesantren Al-Munawwir mulai mengalami guncangan dan fragmentasi internal dan berkembang menjadi beberapa yayasan yang terpisah pengelolaannya. Yayasan Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak yang saat ini dipimpin oleh KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir dan Yayasan Ali Maksum yang dipimpin oleh KH. Attabiq Ali.⁶⁶

Sementara itu dalam Pesantren Al-Munawwir sendiri terdiri dari beberapa unit pendidikan yang pengelolaannya diserahkan secara otonom

⁶⁴ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=9368>

⁶⁵ W.A. Gerungan Dipl. Psych, *Psikologi Sosial* (Bandung : PT Eresco, 1998) Hal : 133.

⁶⁶ Wawancara dengan pemimpin komplek IJ Gus Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi, tanggal 21 November 2014.

kepada beberapa keluarga Bani Munawwir. Dengan demikian aktor politik di Pesantren Al-Munawwir, tidak bisa lagi dilekatkan pada Kiai Najib Abdul Qodir semata.

Dinamika perkembangan politik di pondok pesantren Krapyak mengalami pasang surut dari tahun 1999 sampai 2014, dan disini penulis akan menguraikan bagaimana perkembangan politik di pondok pesantren Al-Munawwir.

1. Pemilu 1999

Era reformasi adalah era kebangkitan politik nasional maupun politik umat Islam yang sudah lama membisu karena adanya tekanan politik dari penguasa orde baru. Munculnya berbagai macam organisasi sosial politik Islam ikut mewarnai semaraknya era reformasi. Reformasi yang menawarkan aroma kebebasan menjadikan ideologi Pancasila yang menjadi ikon orde baru. Perpolitikan nasional kembali diramaikan dengan berbagai ideologi politik yang berbeda seperti masa pemerintahan orde lama. Partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam kembali bertarung untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Dimulai pada pemilu 1999, partai-partai Islam mendapatkan suara yang sangat signifikan seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdlatul Ummah (PNU) dan Partai Keadilan (PK). Perolehan suara yang sangat signifikan dari partai-partai Islam tersebut menjadi

barometer bahwa Islam politik kembali bangkit. Para tokoh-tokoh Islam berjaya dalam dunia politik praktis dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4, juga terpilihnya Amien Rais sebagai ketua MPR RI, dan terpilihnya Akbar Tanjung sebagai ketua DPR RI. Terpilihnya ketiga tokoh Islam dalam lembaga tinggi negara tersebut mengindikasikan bangkitnya politik Islam di Indonesia.

Keberhasilan Abdurrahman Wahid yang berlatar belakangkan NU dan PKB sebagai Presiden RI setelah menyingkirkan Megawati Soekarno Putri seakan menjadi momentum bagi politik Islam untuk memegang kendali politik nasional, apalagi ketua MPR RI juga dipegang oleh mantan ketua PP Muhammadiyah dan PAN yaitu Amien Rais, serta ketua DPR RI oleh mantan ketua PBHMI Akbar Tanjung. Ini sebagai indikasi kemenangan politik Islam era reformasi.

Sama halnya dengan pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak, geliat politik sungguh sangat terasa disini. Hampir seluruh lapisan masyarakat Krapyak ikut dalam pesta demokrasi ini apalagi secara garis politik Pesantren Al-Munawwir adalah pesantren NU yang ikut melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 1999 komunitas pesantren secara penuh mendukung PKB, sehingga partai politik milik warga NU itu berhasil mengumpulkan suara yang signifikan di wilayah Krapyak.

Para kiai pondok mengintruksikan agar para santrinya untuk memilih PKB dan tanpa ada bantahan intruksi ini di amini oleh seluruh para pengurus dan santri. Proses-proses politik yang terjadi di pesantren menunjukkan bahwa

keterlibatan pesantren dalam politik didorong oleh motif politik yang beragam. Motif yang dimaksud di sini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam pesantren, baik yang disadari maupun tidak disadari oleh para santri pondok.

Pemilu 1999 di wilayah Krpayak berhasil memberikan satu kursi untuk Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal menjadi anggota DPRD Yogyakarta, serta KH. Zainal Abidin dan adiknya KH. Ahmad Warsun Munawwir menjadi anggota Dewan Syuro DPP PKB, dan juga KH. Dalhar Munawwir ditunjuk sebagai ketua Dewan Syuro PKB Yogyakarta.⁶⁷

Ini menandakan bahwa pondok pesantren Al-Munawwir menjadi pusat kebangkitan politik Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Yogyakarta, ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh politik nasional yang berkunjung ke pondok ini antaranya KH. Abdurrahman Wahid (PKB), Megawati Soekarno Putri (PDI-P), Alwi Sihab (PKB), Akbar Tanjung (GOLKAR), Hamzah Haz (PPP), guna memohon do'a restu kepada para kiai pondok karena pondok pesantren Al-Munawwir adalah pondok sentral dari pondok tradisional yang ada di Yogyakarta.

2. Pemilu 2004

Perkembangan politik pada pemilu 2004 tidak jauh berbeda dibandingkan pada pemilu 1999 karena kegiatan politik disini hampir sama yaitu

⁶⁷ *Ibid.*

pondok pesantren Al-Munawwir masih menjadi basis massa partai PKB dan Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal mencalonkan kembali menjadi calon legislatif lewat pemilihan langsung dan lolos menjadi anggota DPRD Yogyakarta. KH. Ahmad Warsun Munawwir tetap menjadi anggota Dewan Syuro DPP PKB serta KH. Zainal Abidin menjadi Penasehat Dewan Syuro DPP PKB dan KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir dan KH. R. Hafidh Abdul Qodir menjadi Ketua dan anggota Dewan Syuro PKB Yogyakarta. Juga banyak alumni pondok pesantren Al-Munawwir maju sebagai calon legislatif baik itu DPRD maupun DPR RI didaerahnya masing-masing dan tak sedikit pula yang lolos menjadi anggota dewan.⁶⁸ Pada pemilu ini juga ada himbauan dari para kiai kepada para santri dan masyarakat sekitar untuk memilih PKB.

3. Pemilu 2009

Perpecahan yang dialami PKB pada tahun 2008, mendorong sebagian tokoh di pesantren Krapyak ikut menyokong pembentukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang inisiasi pendiriannya dipelopori oleh komunitas Kiai NU yang kecewa dengan sikap Gus Dur karena berbeda idiologi. Pada Pemilu legislatif dan Pemilu presiden 2009, sikap politik pesantren Krapyak terbelah pada dukungan terhadap partai politik yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama, kelompok yang mendukung Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang disebut sebagai Partai Ulama setelah PKB dilanda

⁶⁸ *Ibid.*

perpecahan eksternal. Pendukung PKNU adalah Yayasan Pesantren Al-Munawwir yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Munawwir. Bahkan Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal (Istri Kiai Zainal Abidin Munawwir yang memimpin pesantren Putri) juga terlibat sebagai calon legislatif untuk DPRD Provinsi Yogyakarta dari PKNU.

Kedua, Kelompok yang mendukung Partai Demokrat yang dalam hal ini dipelopori oleh Yayasan Ali Maksum yang dipimpin oleh KH. Attabiq Ali. Hal ini bisa dimengerti sebab KH. Attabiq Ali adalah mertua dari Anas Urbaningrum, mantan politisi Partai Demokrat yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ketiga, adalah kelompok yang tidak memiliki afiliasi politik yang jelas, termasuk kelompok ini adalah KH. Ahmad Warsun Munawwir yang memimpin Pondok Pesantren Krapyak di komplek Q.⁶⁹

Dinamika internal ini mengakibatkan fragmentasi sikap politik Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang terbelah dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Oleh sebab itu untuk menjelaskan motif keterlibatan pesantren dalam politik juga bukan sesuatu yang mudah. Di sini kita memasuki ranah perdebatan yang sensitif yakni berusaha menjelaskan berbagai alasan yang mendorong pesantren terlibat dalam politik. Satu hal yang sering kali tidak mau diakui oleh komunitas pesantren. Karena keterlibatan pesantren dalam politik dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal dari kondisi-kondisi internal pesantren maupun tekanan eksternal.

⁶⁹ *Ibid.*

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang didukung penuh oleh pesantren pada Pemilu 2009, ternyata kalah telak oleh partai nasionalis seperti PDIP, Golkar dan Demokrat. Kemenangan PDIP merupakan pukulan politik bagi komunitas pesantren Krapyak karena memperlihatkan pengaruh pesantren yang makin memudar di bidang politik.

Bahkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di lingkungan Krapyak Kulon atau di sekitar lingkungan Pesantren Al-Munawwir Krapyak, yakni TPS 44, 45, 46, 47, 54, 55 dan 56, PKNU hanya mengumpulkan 162 suara. Bandingkan dengan suara Partai Demokrat yang berhasil mengumpulkan 300 suara atau unggul hampir 40% dari PKNU.⁷⁰

Hasil ini selain disebabkan oleh popularitas SBY juga menandakan kemenangan kelompok Yayasan Ali Maksum yang dipimpin oleh KH. Attabiq Ali. Sementara itu, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tidak memperoleh suara yang signifikan, dan Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal gagal lolos sebagai Anggota DPRD Propinsi DI Yogyakarta.

Fakta ini menggambarkan bahwa sikap maupun dukungan politik pesantren pada sebuah partai politik tertentu, tidak selalu paralel dengan dukungan masyarakat yang selama ini berada dalam pengaruh pesantren. Dan secara luas, legitimasi pesantren sebagai sumber moralitas politik menjadi tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat.

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Dukuh Krapyak Kulon Bpk. Kunaini, tanggal 1 Januari 2015.

4. Pemilu 2014

Pada periode pemilu ini tidak ada kegiatan politik yang mencolok dengan kata lain menurunnya minat santri untuk terlibat kepada partai politik atau kegiatan politik. Mungkin periode inilah dimana terjadi kemerosotan yang sangat signifikan terhadap politik, dengan dimulainya ketidakpercayaan masyarakat santri terhadap pemilu karena berkaca dari tingkah laku para pejabat legislatif yang banyak terjatuh hukum karena masalah kasus korupsi dan kurang minatnya santri dalam proses pencoblosan dikarenakan masalah teknis dan non teknis. Masalah teknisnya adalah tidak ada anjuran atau perintah dari para kiai agar para santri untuk menggunakan hak pilihnya dan menggiring santri untuk mencoblos partai atau calon anggota dewan tertentu, masalah non teknisnya adalah tidak adanya pendataan dari anggota KPU dalam mendata siapa saja yang ikut memilih pada pemilu partai dan calon legislatif maka tidak ada satupun anggota santri yang ada di pondok pesantren yang ikut pemilu legislatif 2014. Diantara para pengurus kiai ataupun bu nyai yang ikut menjadi calon legislatif hanyalah Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD dari PPP untuk wilayah Kulon Progo, dan beliau gagal lolos karena kalah dalam perolehan suara di daerah tersebut.⁷¹

Jika kita bandingkan pemilu legislatif dari tahun 2004 sampai 2014 banyak penurunan jumlah suara pemilih di pondok pesantren Al-Munawwir, seperti tabel dibawah ini:

⁷¹ Wawancara dengan pemimpin komplek IJ Gus Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi, tanggal 21 November 2014.

Periode Pemilu	Jumlah Santri	Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara
Pemilu 2004	4080	2705	2310
Pemilu 2009	2865	770	655
Pemilu 2014	1460	258	64

Tabel 2.0 Sumber : Data PP. Al-Munawwir.

Menurunnya suara santri ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik teknis maupun non teknis, diantaranya karena tidak adanya anjuran dari pengasuh pondok pesantren atau kiai, banyaknya calon pemilih yang sudah layak memilih dalam segi umur tetapi tidak terdata oleh KPU, kurangnya antusias santri untuk melakukan pencoblosan dikarenakan mereka tidak mengenal calon legislatif, dan berfikir apatis terhadap calon legislatif karena banyak anggota dewan yang terlibat masalah hukum sebab kasus korupsi. Inilah beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya suara santri pada pemilu dari 2014.

A. Faktor Teknis

1. Tidak Ada Anjuran Dari Kiai

Pada masa kampanye pemilu 2014 para kiai tidak memfatwakan kepada para santrinya untuk mengikuti kampanye atau menyuruh para santrinya untuk memilih salah satu partai politik atau salah satu calon legislatif. Serta tidak ada satupun kiai yang ikut mencalonkan diri menjadi calon legislatif

kecuali Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kulon Progo dari partai PPP.

Tetapi secara keseluruhan bahwa pondok pesantren Al-Munawwir benar-benar pada tahun 2014 tidak ikut ambil bagian dalam perayaan pesta demokrasi ini dikarenakan beberapa hal.

Pertama, pondok Al-Munawwir masih diselimuti duka atas kepergian simbah yai Zainal Abidin bulan Februari yang mana beliau adalah pemimpin pusat pondok pesantren Al-Munawwir, kadang beliau yang member keputusan atau perintah bahwa pondok ikut mendukung atau tidak kepada partai politik atau calon legislatif.

Kedua, baru terbentuknya kepemimpinan yang baru dari KH Zainal Abidin Munawwir kepada KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir, sehingga tidak ada perintah langsung dari KH Najib selaku pemimpin pusat untuk memberikan dukungan kepada partai politik atau calon legislatif. Karena pak Najib selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak keliru dalam memilih pilihan politik.

Ketiga, tidak ikut bagian dalam dukung mendukung partai politik atau calon legislatif karena bentuk toleransi kepada Yayasan Pondok Ali Maksu yang mana KH. Attabiq Ali sedang mengalami masalah dengan terjeratnya anak menantu beliau yaitu Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi.

Pondok Ali Maksu pun saat ini masih dalam masa penyidikan pihak hukum karena menyelidiki adakah kaitan / aliran dana dari Anas ke pondok Ali

Maksum. Banyak pihak keluarga / kerabat KH Attabiq Ali dipanggil pihak KPK guna mencari informasi dan juga dijadikan saksi kasus Anas Urbaningrum.⁷²

Para santri dipondok Al-Munawwir ini selalu menunggu perintah dari bapak kiai dalam mengambil keputusan dalam hak politik santri karena bagi santri kiai adalah junjungan mereka yang mereka anggap bahwa keputusan kiai selalu benar.

Seorang santri bisa dipastikan akan mengikuti apa yang difatwakan kiai. Sebab hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh kitab *Ta'limul muta'allim* yang menjadi pedoman para santri dalam menuntut ilmu. Diantara isinya adalah bahwa kunci sukses menuntut ilmu adalah murid wajib menghormati guru dan kitab-kitab yang diajarkannya.⁷³

Selain santri juga percaya bahwa menghormati guru termasuk dalam kategori menghormati ilmu, sebab guru merupakan perantara (*washilah*) untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Para santri pun sangat yakin bahwa politik itu wilayah mu'amalah (sekular) yang profan dan oleh karena itu bila berlawanan dengan pilihan kiainya bukan hal yang malati. Apabila kiai mengeluarkan fatwa atau keputusan maka santri dan masyarakat muslim krapyak yang mengikuti kiai tersebut akan dengan sukarela melaksanakan fatwa tersebut. Seperti yang terjadi di pondok pesantren Al-Munawwir yang mengeluarkan fatwa bagi seluruh santri dan masyarakat untuk mengikuti pilihan politiknya, maka dengan sukarela banyak santri yang mengikuti fatwa politiknya. Pesantren dan santri tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

⁷² Wawancara dengan ketua pengurus PP. Al-Munawwir As'ad Syamsul Arifin, tanggal 1 Januari 2015.

⁷³ *Ibid.*

Kepemimpinan kharismatik kiai ini sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kiai yang kuat "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kiai sebagai "vote getter" terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai *platform* dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas kiai yang menyebar-luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi "pemanfaatan" kepemimpinan kiai di pesantren oleh para politisi baik yang mengusung azas Islam maupun nasionalis (*pragmatism*). Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kiai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Alhasil, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan.

Karena kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat, posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik di masyarakat, sebagai elite terdidik pesantren memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap masyarakat santri tersebut, dengan kekayaan yang dimiliki kiai menjadi patron kepada siapa banyak pendukung bergantung. Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam patronase

ini, terutama kalau pola ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya, hal ini dikarenakan pola hubungan kiai dan santri yang erat merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik santri.

Efektivitas kepemimpinan kiai di pesantren jika ditinjau dari teori kepemimpinan paling tidak memiliki 2 pendekatan yakni (1) power-pengaruh dan (2) pendekatan sifat (*trait theory*). Keefektifan kepemimpinan berdasarkan pendekatan yang pertama itu ditentukan oleh besarnya power yang dimiliki pemimpin (kiai). Power seorang kiai merupakan kekuatan yang diakui oleh pengikutnya menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi mereka. Power ini dapat berupa kedalaman ilmu sang kiai dalam agama serta otoritas yang dimiliki kiai terhadap pesantrennya. Sedangkan pendekatan sifat sering disebut sebagai pendekatan karismatik yakni atribut-atribut personal yang dimiliki kiai misalnya sorotan mata kiai, penampilan, ucapan, intonasi suara sang kiai. Kedua pendekatan ini seandainya terkombinasi secara baik akan menjadikan sang kiai tersebut sosok berkarisma atau sering disebut pemimpin yang berkarismatik.

Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal,

mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.⁷⁴

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kiai pemimpin pondok pesantren itu memiliki potensi politik yang signifikan.

Faktor-faktor yang dimaksud meliputi lima hal :

Pertama : ikatan tradisional,

Ikatan tradisional antara kiai dan intern pondok pesantren, dengan pemerintah dan lingkungan, sangat kuat dan terpadu sehingga berpengaruh terhadap dinamika proses kehidupan di desa. Ikatan batin yang terjalin antara elemen-elemen pondok pesantren dengan lingkungan sosial yang dapat membentuk kekuatan sosial politik, sehingga ikatan tradisional tersebut mempunyai kekuatan untuk bersama sama merespon apa yang menjadi kehendak kiai.

Kedua, kemampuan intelektual,

Kiai biasanya memiliki keunggulan intelektual. Ia mampu mengeliminasi anasir-anasir buruk yang mengancam eksistensi diri dan lembaganya serta mampu memanfaatkan loyalitas keagamaan masyarakat dengan karismanya.

Ketiga, hubungan,

Dalam perspektif sosiologi, kiai dipandang sebagai sosok yang berstatus tinggi, terhormat dan disegani oleh masyarakat. Di atas kesamaan

⁷⁴ substantiajurnal.org/index.php/subs/article/download/5/4. Hal : 56.

keyakinan dan nilai-nilai, kiai dapat membangun pola-pola interaksi dan hubungan antara pondok pesantren dengan masyarakat pedesaan.

Keempat, kemampuan mobilisasi,

Retorika kiai dengan daya memimpin karismatik yang didukung oleh otoritas moral dan keagamaan mampu memobilisasi masyarakat untuk kepentingan sosial, termasuk untuk kepentingan politik praktis.

Kelima, kekuatan katalisasi,

Pesan-pesan kiai pondok pesantren di dalam bidang agama, pendidikan dan kemasyarakatan diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

Sentralitas figur kiai dalam setiap sisi kehidupan masyarakat memberikan peluang kepada mereka untuk ikut berperan dalam arena politik praktis di wilayah Krapyak pada pemilu 1999-2004-2009. Peranan kiai dalam politik terlihat dalam dua hal :

- a. Kiai sebagai sosok legitimator partai politik.
- b. Kiai sebagai instrumen pendulang suara. Peranan kiai dalam politik memberikan jaminan bagi partai politik untuk memperoleh suara. Instrument tersebut dapat berbentuk pencalonan kiai sebagai anggota legislatif atau juru kampanye, penasihat partai atau lainnya dengan tujuan sebagai daya pikat atas santri dan masyarakat sekitarnya.
- c. Kiai sebagai hakam. Posisi kiai didalam dunia pesantren menempati posisi strategis, kedudukan yang demikian tidak lepas dari kontruksi sosial yang ada dalam masyarakat pesantren. Kedudukan kiai sebagai

elit tradisional tidak lepas dari teori tentang kompetisi antar individu yakni yang paling berbakat memperoleh kedudukan tinggi dalam tangga sosial.

Kedudukan tersebut terjadi karena pesantren merupakan suatu sistem masyarakat yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada pesantren saja, tetapi juga berpengaruh pada lingkungannya. Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren.

Ajaran kitab *Talimun Muta'alim* lebih mengedepankan makna pengkultusan sang kiai. Kiai memegang peranan sentral dalam pelaksanaan, aktivitas pesantren, akibatnya proses dialogis tidak terjadi. Santri tidak diberi peluang menggagas ide lantaran terkungkung oleh diskursus tabu mendebat pemikiran kiai.⁷⁵

Peran kiai dalam masyarakat atau dalam politik praktis sangat erat kaitannya dengan faktor kewibawaannya dalam masyarakat. Dengan kewibawaan tersebut kiai menempati posisi strategis, baik dikalangan masyarakat atau partai politik. Kewibawaan tersebut muncul karena beberapa hal :

- a. Adanya klaim kebenaran, bahkan "pengkultusan terhadap kiai" bahwa kiai adalah pengganti Nabi (kontek masyarakat santri adalah Auliya)⁷⁶ sehingga timbul penilaian masyarakat bahwa kiai adalah sosok pembawa kebenaran.

⁷⁵ Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren* (Yogyakarta : Pilar Religia, 2005) Hal : 153.

⁷⁶ Wawancara dengan ketua pengurus PP. Al-Munawwir As'ad Syamsul Arifin, tanggal 1 Januari 2015.

- b. Kiai mampu berinteraksi langsung terus menerus dalam keseharian santri dan mampu memahami kondisi sosio-psikis santri dan kiai menjadi tempat berlabuh untuk urusan agama, pendidikan dan tempat mengadu sehingga tidak heran jika karisma kiai lebih tinggi dari siapapun.

Sebagai pemimpin pondok yang memiliki pengaruh dan memiliki keputusan yang mutlak dan harus diikuti oleh para santri tanpa ada bantahan sedikitpun. Masyarakat santri yang berada disekitar kiai dengan sendirinya akan senantiasa berusaha menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan kiai. Kiai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan keputusannya dibanding dengan tokoh manapun.

Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa keterlibatan pesantren dalam politik mengambil bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh Kiai, Ustadz, Nyai ataupun santri. Dengan demikian kita dapat membuat beberapa model keterlibatan pesantren dalam politik dengan mengamati berbagai proses keterlibatan politik pesantren yang terjadi selama ini.

2. Rendahnya Kesadaran Partisipasi Politik Santri Pada Pemilu

Tingkat partisipasi masyarakat Krpyak dalam pemilu dari tahu ketahu semakin menurun. Dari pemilu tahun 2004 tingkat partisipasi santri dalam pemilu mencapai 84%, sedangkan dalam pemilu tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat santri menurun menjadi sekitar 71%. Dan pada tahun 2014 tingkat

partisipasi santri dalam pemilu mencapai 25%.⁷⁷ Penurunan ini disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi santri dalam pemilu, antara lain:

1. Masih tingginya golput,
2. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan,
3. Hilangnya harapan masyarakat terhadap calon legislatif,
4. Tingkat pemahaman politik dalam masyarakat yang masih rendah,
5. Tingkat kejenuhan masyarakat santri yang tinggi sehingga membuat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum berkurang,
6. Kurangnya sosialisai bagi pemilih.

Demikian yang dipaparkan dalam wawancara oleh narasumber KH. R. Hafidh Abdul Qodir⁷⁸

Fenomena golput (golongan putih) sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari penilaian masyarakat terhadap kinerja pemimpin, para wakil rakyat dan terutama partai politik. Masyarakat berpandangan bahwa memilih atau tidak memilih hasilnya sama saja karena tidak membawa pada perubahan. Terlebih secara kualitas dan kuantitas, kondisi Indonesia tak dipungkiri memang kian memburuk di berbagai bidang kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian fenomena golput semakin menguatkan bahwa santri tidak terlalu yakin pemilu akan membawa pada perubahan. Apalagi mereka sudah berulang kali

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Dukuh Krapyak Kulon Bpk. Kunaini, tanggal 1 Januari 2015.

⁷⁸ Wawancara dengan Pemimpin Komplek MH-2 KH. R. Hafidh Abdul Qodir, tanggal 31 Desember 2014.

dikecewakan oleh orang-orang yang mereka percayai sebagai wakil dan pembawa aspirasi mereka, berikut parpol yang mengusungnya.

Didaerah krapyak selama hampir 3 bulan ini semenjak DPR periode 2014 – 2019 dilantik menunjukkan, bahwa mayoritas masyarakat menilai kinerja parpol dan kader parpol masih tidak memuaskan. Hasil survey menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja parpol hanya sebesar 30,1%, sementara yang tidak puas lebih banyak lagi, yakni 64,6%. Mayoritas publik juga menyatakan bahwa partai politik belum memberikan manfaat nyata untuk rakyat, yaitu 78,1%. Hanya sebesar 21,9% dari publik yang menyatakan bahwa partai politik telah memberikan manfaat nyata untuk rakyat.

Ini didasari oleh lambannya kinerja anggota dewan serta pertikaian antara koalisi merah putih (KMP) dan koalisi Indonesia hebat (KIH) yang menjadikan dualisme ditubuh DPR. Banyak kasus lainnya yang memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap legislatif maupun eksekutif.⁷⁹

3. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Santri Terhadap Parpol dan Kader Parpol

Yang membuat penurunan partisipasi masyarakat santri dalam pemilu adalah turunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu (KPU). Penyebab lainnya penurunan minat ikut pemilu disebabkan karena kepercayaan publik pada partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) yang diusung parpol menurun. Jika masyarakat kurang percaya pada peserta pemilu maka

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Dukuh Krapyak Kulon Bpk. Kunaini, tanggal 1 Januari 2015.

Faktanya, masyarakat memang sudah terlalu sering disuguhi praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan parpol dan kader partai di parlemen yang dilakukan secara telanjang. Parpol diduga sering menyalahgunakan fungsi-fungsi politiknya untuk mendapatkan keuntungan materi, seperti melelang dukungan kepada para pemilik modal yang berniat menjadi penguasa, memeras gubernur atau para petinggi eksekutif yang dikemas dengan bentuk-bentuk dukungan tidak langsung kepada mereka atau bahkan melalui tekanan terhadap petinggi bermasalah dalam penanganan proyek-proyek pembangunan mereka.⁸¹

Sedangkan parlemen, khususnya di sejumlah DPRD, masyarakat juga telah menyaksikan sendiri bagaimana sepak terjang para politisi dapat memainkan banyak pos anggaran APBD untuk mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk memainkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati, wali kota, dan gubernur untuk kemudian mendapatkan imbalan materi agar LPJ diloloskan sehingga petinggi eksekutif di daerah dapat melanjutkan roda pemerintahannya.⁸²

Selain itu, parlemen sebagai representasi parpol, terbukti tidak mampu menyerap aspirasi rakyat. Bahkan, banyaknya kursi kosong atau politisi tertidur saat sidang-sidang penting di parlemen, menunjukkan bahwa para wakil rakyat memang tidak sungguh-sungguh berniat memperjuangkan kepentingan rakyat. Padahal selama ini rakyat terlanjur 'ditipu' dengan berbagai slogan dan simbol seakan-akan kader parpol di parlemen adalah penyambung lidah rakyat demi mewujudkan harapan rakyat, yaitu tercapainya kesejahteraan hidup. Namun

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

berbagai 'pengkhianatan' telah dilakukan anggota parlemen yang mengatasnamakan wakil rakyat dengan cara mengukuhkan bobroknya sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan penguasa.

Terbukti produk hukum yang dilahirkan oleh parlemen kebanyakan tidak memihak kepada rakyat, bahkan bertentangan dengan kehendak rakyat atau pro kapitalis bahkan pro asing. UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU BHP, UU Pornografi, UU KDRT, UU Kespro dan UU lainnya adalah buktinya.⁸³

Melalui UU Migas misalnya, pemerintah dan kader parpol di parlemen berselingkuh dengan membuat kebijakan yang merugikan rakyat; mengurangi subsidi terhadap BBM. Akibatnya, harga BBM dalam negeri naik dan lagi-lagi rakyat sebagai pemilih sah kekayaan bumi ini yang menjadi korbannya. Berdasarkan UU Kelistrikan, PLN pun secara bertahap di privatisasi. Dipastikan dengan privatisasi PLN, listrik akan semakin mahal.⁸⁴

Harapan atas kesejahteraan hidup pun hanya ilusi. Kondisi ini kemudian diperparah dengan pertunjukan perilaku amoral yang dilakukan sebagian oknum kader partai di parlemen. Apa yang terekspose ke permukaan, hanyalah puncak gunung es dari budaya yang sudah kadung dipahami "lumrah" dilakukan sebagian warga gedung parlemen. Begitupun perilaku korup dan menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, menjadi catatan terbuka yang bisa dibaca siapapun dan kapanpun. Sehingga sangat beralasan jika tingkat

⁸³ Wawancara dengan Kepala Dukuh Krapyak Kulon Bpk. Kunaini, tanggal 1 Januari 2015.

⁸⁴ *Ibid.*

kepercayaan masyarakat kian melemah. Mereka kesal dengan rapuhnya kinerja para penguasanya, termasuk para anggota parlemen yang diusung parpol.

B. Faktor Non Tehnis

Yakni terkait administratif, misalnya tidak mendapat undangan atau tidak tercantum sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tidak adanya pendataan dari pihak kelurahan dan badan pusat statistik yang mendata siapa saja para santri yang cukup umur untuk melakukan pemilihan umum legislatif 2014, sehingga data KPU Yogyakarta hanya mencantumkan data calon pemilih pada tahun 2009 sehingga tidak ada pemilih pemula.. Dalam hal ini KPU memiliki alasan bahwa para santri adalah bukan penduduk tetap daerah Krpyak sehingga pendataan nama mereka sudah dilakukan dikampung masing-masing daerah asal santri itu sendiri dan ini untuk menghindari daftar pemilih ganda, padahal banyak juga santri yang memiliki KTP daerah Krpyak yang tidak ikut terdata.

Dalam pemilu legislatif sebanyak 258 santri terdaftar sebagai calon pemilih.⁸⁵ Rincian data per komplek :

No.	Komplek	Jumlah Pemilih
1	MH-1	56
2	MH-2	6
3	Nurussalam Putri	8
4	Nurussalam Putra	23

⁸⁵ Wawancara dengan ketua pengurus PP. Al-Munawwir As'ad Syamsul Arifin, tanggal 1 November 2014.

5	AB	-
6	CD	3
7	EF	-
8	Q	15
9	L	21
10	R-1	27
11	R-2	-
12	IJ	8
13	K-1	-
14	K-2	19
15	PJ	45
16	S	3
17	T	-
18	M	8
19	Arofah	16

Tabel 3.0 Sumber : Data PP. Al-Munawwir.

Penyelenggara pemilu yang tidak profesional serta regulasi yang tidak jelas, tidak lengkap, inkonsisten, dan multitafsir yang membingungkan masyarakat santri. Serta kurangnya sosialisasi KPU, Partai Politik dan Calon Legislatif

Kesimpulan

Kecenderungan semakin menurunnya partisipasi santri dalam pemilu menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Seperti ditunjukkan di atas, dari pemilu ke pemilu pada masa reformasi ini tingkat partisipasi politik dalam memberikan suara cenderung terus turun. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cenderung menurunnya partisipasi politik dalam pemilu tersebut, baik karena faktor teknis maupun faktor non teknis / administratif.

Karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan kesadaran pada masyarakat perlunya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di satu sisi, di sisi lain menjadi perhatian bersama bagi para elite politik tentang warning tersebut (tingkat partisipasi yang rendah/golput). Karena rendahnya tingkat partisipasi bukan terletak pada masyarakat, tetapi bisa jadi didorong oleh faktor perilaku elite itu sendiri yang mengecewakan masyarakat.

Berikut tabel tentang faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya suara santri pada pemilu legislative 2014 di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta:

Faktor-faktor penyebab turunnya suara politik	Faktor teknis	Tidak adanya anjuran dari kiai
---	---------------	--------------------------------

<p>santri pada pemilu legislative 2014 di PP Al-Munawwir</p>		<p>Rendahnya kesadaran partisipasi politik santri pada pemilu</p>
		<p>Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Santri Terhadap Pарpol dan Kader Pарpol</p>
	<p>Faktor non tehnis</p>	<p>Tidak adanya pendataan dari KPUD Yogyakarta bagi calon pemilih</p>

Tabel 4.0